

BAB II

KONSISTENSI BANTUAN LUAR NEGERI JERMAN TERHADAP PALESTINA (2010 – 2022)

Bab ini akan dibagi menjadi beberapa bagian untuk membedah kebijakan bantuan luar negeri Jerman terhadap Palestina. Selaras dengan teori yang digunakan yakni utilitarianisme yang melihat utilitas terbesar bagi pembuat kebijakan dan aktor lainnya, maka dari itu peneliti terlebih dahulu membedah kebijakan Jerman sebagai aktor utama. Dimulai dari membahas lembaga yang berkewenangan dalam membuat kebijakan bantuan luar negeri, jenis bantuan yang diberikan, serta rincian besaran bantuannya. Selain itu, pada bagian ini peneliti juga akan mengulik aktor-aktor lain yang sekiranya memiliki keterlibatan dari kebijakan bantuan Jerman, agar di bagian selanjutnya peneliti dapat melihat dampak kepuasan yang diperoleh oleh aktor-aktor lainnya atas kebijakan tersebut.

2.1 Hubungan Luar Negeri Jerman dan Palestina

Konflik yang terjadi antara Israel dengan Palestina memberikan dampak adanya masyarakat Palestina yang terkena pemindahan paksa. Pada dasarnya, masyarakat Palestina sebagian besar memiliki prinsip untuk tidak meninggalkan tanah kelahiran mereka. Meskipun begitu, adanya konflik yang terjadi membuat sebagian kecil dari masyarakat Palestina yang meninggalkan wilayahnya untuk penghidupan lebih baik. Jerman menjadi salah satu negara tujuan bagi para pencari suaka Palestina untuk mendapat perlindungan. Inilah yang salah satunya melahirkan adanya diaspora orang-orang Palestina di Jerman (Ragab & Koch, 2019).

Diaspora orang-orang Palestina mulai sekitar tahun 1950 an dimana orang-orang dengan memiliki skill kurang memadai mencari perlindungan ke Jerman sebagai para pekerja kasar paruh waktu. Barulah pada tahun 1960an orang-orang Palestina yang bermigrasi ke Jerman merupakan orang-orang dengan skill yang cukup memadai. Tidak lagi datang sebagai pekerja kasar, orang-orang Palestina pada saat itu datang untuk mencari pendidikan yang memadai di Jerman. Hal ini terjadi salah satunya karena faktor gelombang pengungsi Lebanon yang ada di daratan Arab membuat para pengungsi Palestina yang tercampur di wilayah itu mendapat pendidikan yang kurang layak (Ragab & Koch, 2019)

Adanya sejarah panjang antara Jerman dan Israel, di sisi lain membuat Jerman lebih terlibat di dalam permasalahan yang ada di kawasan Timur Tengah. Kedekatan dengan Palestina berawal dari adanya penandatanganan perjanjian damai Oslo dan pembentukan otoritas Palestina (Palestinian Authority). Perjanjian ini bermula dari adanya perjanjian Camp David tahun 1978 yang tidak bekerja maksimal antara mesir dengan Israel dimana terdapat proses pengembalian Semenanjung Sinai kepada Mesir dan juga pembahasan terkait dengan pembentukan negara Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza. Tetapi pada saat itu sayangnya Israel justru secara terang-terangan menolak adanya diskusi dan pertemuan negosiasi dengan pihak PLO (Palestine Liberation Organisation) sehingga memunculkan berbagai konflik dan perang di tahun 1982 dan pecahnya perang intifada pada tahun 1987 tepatnya d Jalur Gaza, Tepi Barat serta Yerusalem Timur (Husein Raif, 2019).

Kegagalan dari Perjanjian David Camp ini melahirkan perjanjian selanjutnya yakni Perjanjian Damai Oslo, yakni sebuah upaya untuk membangun adanya negara Palestina melalui negosiasi terbaru di antara PLO yang diwakili oleh kepalanya Yasser Arafat dan Israel melalui Perdana Menteri Yitzhak Rabin. Perjanjian ini diselenggarakan di Norwegia dengan bantuan fasilitas dari Diplomatnya yakni Egeland yang dinilai memiliki hubungan baik dengan kedua belah pihak yang berkonflik. Perjanjian ini berlangsung 2 kali yakni pada tahun 1993 dan tahun 1995. Pada perjanjian pertama dicapai hasil negosiasi bahwa PLO mau berdamai dan memberikan pengakuannya terhadap negara Israel, serta adanya penerimaan resolusi dari Dewan Keamanan PBB No 242 & 338 sehingga Israel harus mau berkomitmen untuk mengupayakan penyelesaian konfliknya dengan damai. Dalam perjanjian ini juga diatur bahwa Israel harus menarik pasukannya terutama di Jalur Gaza dan Jericho. Selain itu Palestina diperkenankan untuk mengurus urusan dalam negerinya serta melakukan pemilihan Dewan Perwakilan Palestina. Perjanjian Oslo ini juga turut membentuk adanya komitmen dari negara-negara Eropa dan Amerika Serikat untuk menjadi pendonor dalam membantu pembangunan yang ada di Israel (Anwar, 2009).

Perjanjian Oslo kedua dilaksanakan pada tahun 1995 di Washington DC Amerika Serikat. Perjanjian ini menghasilkan kesepakatan dimana Jerman harus mundur dan menyerahkan 90% wilayah yang ada di Tepi Barat. Perjanjian Oslo kedua ini membahas bahwa Israel juga harus menarik mundur pasukannya yang menempati beberapa daerah seperti Ramallah, bethlehem, Nablus, Qalqiyah, Jenin, dan Tulkarem pada akhir tahun 1995. Meskipun begitu, terdapat beberapa catatan

dari perjanjian kedua ini salah satunya adalah kritik atas negara-negara donor yang nyatanya belum membuktikan komitmennya untuk membantu pembangunan Palestina secara maksimal. Sayangnya perjanjian ini juga tidak berlangsung lama karena kemudian terjadi beberapa konflik baru disebabkan oleh permintaan Amerika Serikat dalam pembangunan perumahan baru Israel di wilayah Tepi Barat yang mengakibatkan pembangunan Palestina semakin melambat. Hal ini menyebabkan adanya Intifada kedua dimana Palestina menyerukan adanya kekerasan yang dilakukan oleh Israel (Sihbudi R, 2007).

Melalui perjanjian ini muncullah upaya Pemerintah Jerman untuk membentuk ‘Kebijakan Kesetaraan’ terhadap Palestina juga. Setelah itu, diketahui Jerman memulai perannya sebagai donor utama kepada Otoritas Palestina. Jerman memulai bantuannya kepada Palestina sekitar tahun 1980 an dengan memberikan sekitar 1.2 miliar euro untuk kerjasama pembangunan negara tersebut. Meskipun begitu, hubungan bilateral yang signifikan di antara keduanya barulah dimulai sejak tahun 2010 dimana Jerman membentuk adanya German-Palestinian Steering Committee sebagai upaya menciptakan solusi dua negara yang difasilitasi oleh Pemerintah Jerman. Dari situlah kemudian Jerman terus meningkatkan bantuannya kepada Palestina baik dalam bantuan pembangunan ekonomi, kemanusiaan, diplomatik, hingga politik Palestina. Bantuan juga diberikan melalui berbagai pihak, mulai dari PBB, organisasi Internasional, hingga organisasi non-pemerintah yang ada di wilayah Palestina (German Federal Foreign Office, 2021).

Meskipun Jerman memberikan banyak bantuan luar negerinya kepada Palestina, nyatanya hingga saat ini Jerman belum pernah memberikan pernyataan

pengakuan atas kedaulatan Palestina sebagai sebuah negara. Hal ini dikarenakan salah satunya karena menurut Jerman, tanah Palestina merupakan wilayah dari Turki. Pernyataan ini secara jelas dinyatakan oleh pengadilan berdasarkan pasal 3(1) No. 2(b) pada akta pengungsi (*asylum act*):

Both the West Bank and the area east of the Jordan River (East Bank, Transjordan) were part of the Ottoman Empire until the end of the First World War and were placed under British mandate after its defeat in the First World War. [...]

Jerman sendiri memiliki hubungan yang cukup romantic dengan Turki di masa lalu. Jerman dan Turki memulai kedekatannya pada masa Perang Dunia ke I dimana keduanya merupakan sekutu di bawah Blok Sentral. Keduanya Bersatu untuk menghadapi Blok Entente yang terdiri dari Inggris, Prancis, dan Russia. Pada saat itu, Turki membantu pengungsi Jerman untuk dapat berlindung dari kekejaman NAZI sebagai penguasa Jerman di eranya. Tidak berhenti disitu, Turki juga membantu Jerman untuk dapat bangkit ekonominya setelah porak poranda karena peristiwa Perang Dunia II. Hubungan keduanya masih terus terjalin hingga saat ini melalui adanya migrasi kedua negara, kerjasama ekonomi perdagangan, kerjasama politik, dan berbagai Kerjasama di aspek lainnya (Siagian, 2018).

2.2 Kebijakan Bantuan Luar Negeri Jerman dan Lembaga yang Berwenang

Jerman merupakan salah satu negara yang memiliki kekuatan besar di dunia, terlebih dalam hal ekonomi. Berdasarkan data yang dirilis oleh World Bank, Jerman terus mengalami peningkatan GDP yang signifikan sejak tahun 1970 hingga 2021 berada pada angka 4,259,934.91 USD (World Bank, 2021). Dengan begitu,

saat ini Jerman menjadi negara keempat dengan kemampuan ekonomi terbesar setelah Amerika Serikat, China, dan Jepang.

Adanya kemampuan ekonomi Jerman inilah yang turut membuat negara ini memiliki tanggung jawab khusus terhadap negara lainnya, terutama terhadap negara yang rapuh (*fragile state*). Dikutip melalui laman resmi Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ), Svenja Schulze (Menteri Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman) mengatakan bahwa Jerman menyadari adanya tanggung jawab besar ketika berbicara soal kerjasama global yang saat ini difokuskan pada aspek kemajuan pembangunan, solidaritas, dan keadilan (BMZ, 2023). Dalam permasalahan pembangunan internasional, terdapat 3 kementerian utama yang berperan dalam terciptanya kebijakan bantuan luar negeri:

2.2.1 Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ)

BMZ memiliki beberapa tugas multifungsi yakni perencanaan program kerjasama pembangunan Jerman, bekerjasama dengan masyarakat sipil dan sektor privat, bekerjasama dengan negara partner dan organisasi multilateral, serta memberikan informasi terkait program pembangunan dan pendidikan. Dalam menjalankan tugasnya, kementerian ini tidak hanya terdapat di Berlin dan Bonn tetapi juga membangun kantor di negara partner, area Uni Eropa, bank pembangunan, dan organisasi internasional. Hal ini dilakukan untuk bisa mempermudah mereka menjalankan fungsinya dalam berkoordinasi berbagai macam program pembangunan serta ditujukan untuk memperkuat setiap kebijakan pembangunan multilateral yang ada. Kementerian ini juga turut menugaskan staf

nya untuk ikut mengambil peran dalam misi permanen Jerman bersamaan dengan Organisasi Internasional seperti United Nation (UN) di 3 negara Jenewa; New York; Roma, Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) di Paris, dan European Union di Brussel. Tidak sampai disitu saja, BMZ juga memiliki staf yang ditempatkan di dewan Bank Dunia (World Bank) dan Bank Pembangunan Afrika, Asia, Inter-Amerika dan Karibia (African, Asian, Inter-American and Caribbean Development Banks). Sebagai upaya Jerman untuk memperkuat kerjasama multilateral terkhusus kebijakan pembangunan, kementerian ini juga menjalin dengan sejumlah organisasi internasional lainnya seperti United Nation Development Programme (UNDP), World Food Programme (WFO), dan International Organisation for Migration (IOM) (BMZ, 2022).

Dalam menjalin kerjasama multilateral, Jerman bekerja sama dengan Uni Eropa, dimana Jerman menjadi mitra kunci dengan menyedakan 21% budget Uni Eropa. Jerman melalui BMZ juga mengadvokasi berbagai isu berkelanjutan dan globalisas melalui keanggotaannya di G7 dan G20 (OECD, 2021).

Tabel 2.1 Facts and Figures of German Development Cooperation

No	Types	Amount (thousand euros)	Percentage (%)
1.	Bilateral Official Development Cooperation	5.755.735	47,2
2.	Civil Society and Business groups and Institutions	1.358.895	11,2
3.	Special Initiative	1.121.100	9,2
4.	United Nations and International Institutions	988.182	8,1
5.	International Food Security and	973.874	8,0

	Global Environmental Protection		
6.	World Bank	913.034	7,5
7.	European Development Fund	432.176	3,6
8.	Regional Banks	309.320	2,5
9.	Ministry Costs	155.374	1,3
10.	Other Grants	95.875	0,8
11.	Research, Evaluation, and Training in Development Cooperation	53.254	0,4
12.	Administrative Cost	6.372	0,2
Total Amount:		12.156.837 (thousand euros)	

Source: Federal Ministry for Economic Cooperation and Development, 2023

Kementerian Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman (BMZ) memiliki beberapa organisasi turunan yang selanjutnya lebih fokus menangani urusan kerjasama dan bantuan luar negeri. Beberapa institusi yang terkait adalah Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) sebagai institusi Masyarakat Jerman untuk Kerjasama Internasional, Centrum für Internationale Migration und Entwicklung (CIM) sebagai Pusat bagi Migrasi dan Pembangunan Internasional, Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) Bank sebagai Bank yang memuat kerjasama finansial Jerman dengan negara-negara berkembang.

1) Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)

GIZ dibentuk agar dapat mencapai tujuan khususnya dalam lingkup kerjasama internasional untuk pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Lembaga ini mencakup beberapa ranah yakni kerjasama dan pembangunan ekonomi, aksi lingkungan internasional, prevensi terhadap krisis sipil, serta berbagai permasalahan pada area kebijakan ekonomi dan energi.

2) Centrum für Internationale Migration und Entwicklung (CIM)

Center for International Migration and Development merupakan lembaga di bawah naungan pemerintah federal Jerman khususnya BMZ, yang memiliki kompetensi utama dalam hal mobilitas tenaga kerja internasional (international labour mobility). Lembaga ini bekerja di bawah tujuan pembangunan global (Sustainable Development Goals) sebagai panduan dalam mencapai dampak positif dari mobilitas tenaga kerja di seluruh dunia.

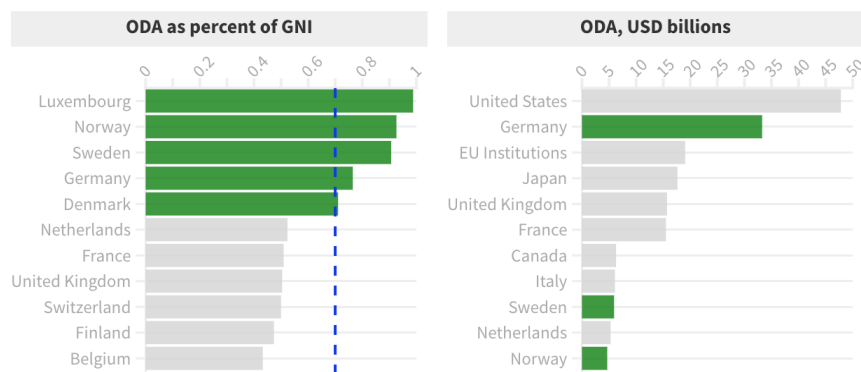
3) Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) Development Bank

Kreditanstalt für Wiederaufbau merupakan Bank Pembangunan afiliasi dari Pemerintah Federal Jerman untuk mencapai tujuan di dalam kebijakan pembangunan dan kerjasama pembangunan internasional. Bank ini bertugas untuk mendanai serta mendukung adanya program-program yang mayoritas melibatkan pemain di ranah sektor masyarakat di negara-negara berkembang, mulai dari tahap pengonsepan, eksekusi hingga adanya memonitor adanya kesuksesan dari program yang telah dibuat. Bank ini memiliki tiga macam produk bantuan keuangan, yakni hibah (grants), pinjaman pembangunan (development loans), dan pinjaman promotional (promotional loans) (KfW, 2023).

Pemberian bantuan ekonomi dan pembangunan secara global diatur resmi oleh organisasi bernama OECD (Organization of Economic Cooperation and Development) melalui program ODA (Official Development Agenda). Jerman melalui BMZ juga menjadi salah satu negara yang memberikan bantuan ekonomi melalui adanya program ini. Diketahui melalui data resmi yang dirilis oleh OECD,

Jerman merupakan penyedia proyek kerjasama pembangunan terbesar kedua di DAC (Development Assistance Committee).

Pada tahun 2016, berdasarkan jumlah, Jerman menjadi negara terbesar kedua sebagai donor dalam bantuan pembangunan sebesar 24.67 miliar USD, setelah Amerika Serikat yang menggelontorkan dana sebanyak 33.59 miliar USD dan kemudian diikuti oleh Inggris, Jepang, dan Perancis. Meskipun begitu, berdasarkan persentase GNI pada tahun 2016 Jerman baru saja bisa mencapai target dari OECD yakni 0.70% menempati urutan kelima di bawah Norwegia, Luxemburg, Swedia, dan Denmark (OECD, 2017).



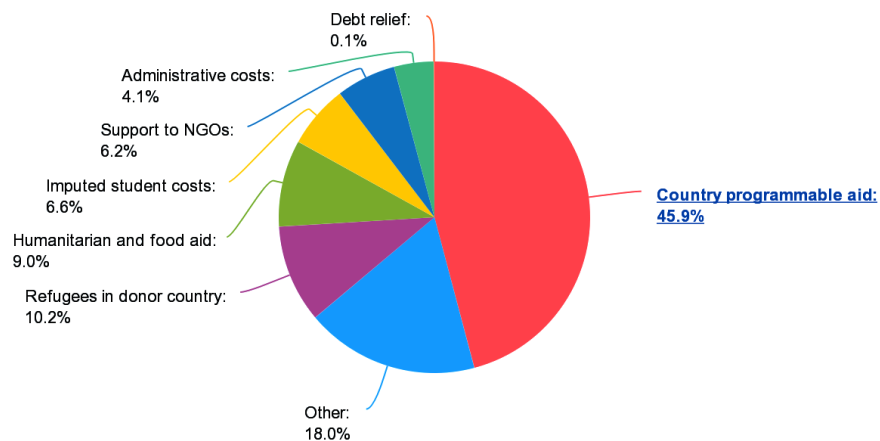
Grafik 2.1 Official Development Assistance (ODA) in 2022, by members of the DAC

Source: The Organisation for Economic Co-operation and Development, 2022

Pada tahun 2021, Jerman masih tetap berhasil menempati posisi sebagai negara terbesar kedua sebagai donor dalam bantuan pembangunan sebesar 33.27 miliar USD tepat di bawah Amerika Serikat yang memberikan bantuan sejumlah 47.8 miliar USD, serta berada di atas Uni Eropa, Jepang, dan Inggris. Pada tahun ini, Jerman juga telah berhasil memberikannya di atas target persentase GNI yang ditetapkan PBB sebesar 0.7%. Jerman memberikan bantuannya sebesar 0.76% yang membuatnya menempati posisi keempat setelah Luxemburg,

Norwegia, dan Swedia. Jerman juga berhasil menggantikan posisi Denmark yang menjadi negara kelima sebagai donor berdasarkan persentase GNI (OECD, 2021).

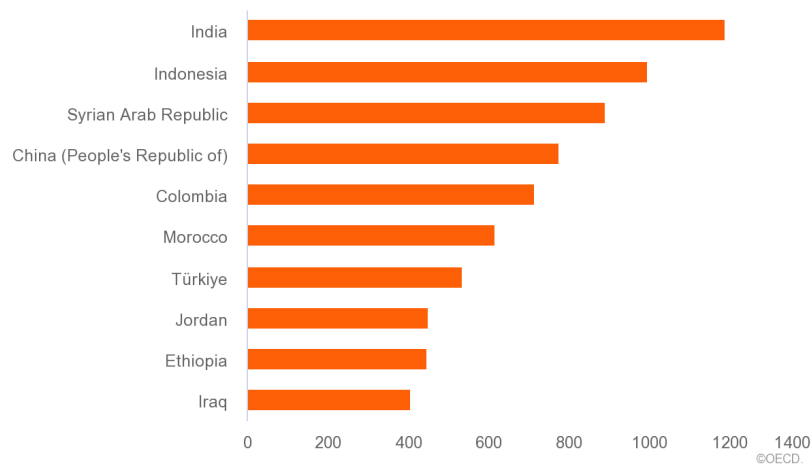
Bantuan yang diberikan terbagi menjadi dua yakni multilateral ODA dan bilateral ODA. Multilateral ODA mayoritas diberikan kepada institusi naungan Uni Eropa dan PBB untuk nantinya diwujudkan menjadi berbagai program-program pembangunan. Melalui data dari OECD, PBB menerima 40% dari ODA yang diberikan oleh Jerman, yang di dalamnya didistribusikan sebagian besar kepada WPF (1.2 miliar USD), UNICEF (0.7 miliar USD), dan UNDP (0.6 miliar USD) (OECD, 2021).



Grafik 2.2 Germany – Bilateral ODA by Type of Expenditure 2020

Source: The Organisation for Economic Co-operation and Development, 2020

Bantuan bilateral juga diberikan dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Hampir separuh dari keseluruhan bantuan ODA bilateral Jerman diberikan kepada negara-negara yang telah masuk program bantuan, yakni sebesar 45.9% ODA bilateral (OECD Report, 2020).



Grafik 2.3 Germany – Top 10 Recipients 2020

Source: The Organisation for Economic Co-operation and Development, 2020

Dari berbagai negara yang mendapatkan bantuan bilateral ODA, India menjadi negara penerima terbesar dengan jumlah bantuan sebesar 1,189.8 juta USD, dilanjutkan dengan Indonesia sebesar 997.1 juta USD, dan Suriah sebesar 890.5 juta USD. Meskipun begitu secara geografis, pada tahun 2020 Jerman memutuskan untuk fokus pada area Afrika dan Asia. Diketahui 6.6 miliar USD dialokasikan ke Afrika, 5.0 miliar USD dialokasikan ke Asia, sedangkan 2.8 miliar USD dialokasikan ke Timur Tengah (OECD Report, 2020). Fokus utama dari ODA Bilateral Jerman ditujukan kepada pelayanan dan infrastruktur sosial, dilanjutkan dengan infrastruktur ekonom dan sektor lainnya.

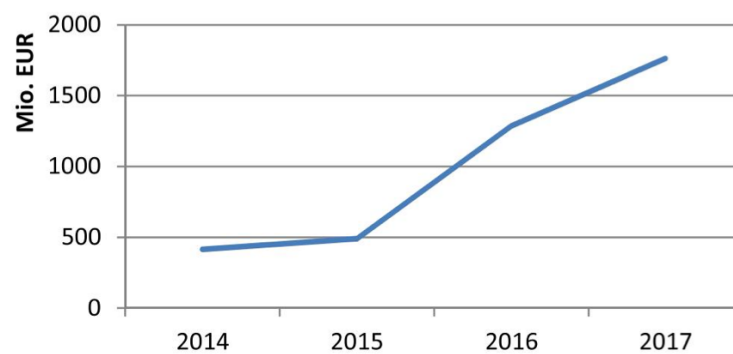
2.2.2 Federal Foreign Office (Auswartiges – Amt)

Kementerian Luar Negeri Federal Jerman (Federal Foreign Office) yang dalam bahasa Jerman disebut dengan Auswaertiges Amt, merupakan kementerian yang menjadi perwajahan kepentingan Jerman kepada dunia Internasional. Fungsi utama dari kementerian ini adalah untuk mempromosikan adanya international exchange dan menyediakan adanya perlindungan serta bantuan kepada masyarakat Jerman yang ada di luar negeri. Tidak hanya mencakup hal itu saja, kementerian

yang memiliki 230 misi luar negeri ini juga bertanggung jawab untuk menjaga hubungan Jerman dengan negara, teritori, serta organisasi lainnya (internasional dan supranasional). Beberapa bidang yang menjadi tugas dari kementerian ini adalah interaksi luar negeri dalam hal bisnis, budaya, sains dan teknologi, lingkungan, dan permasalahan pembangunan. Kementerian ini juga turut mengurus hal-hal yang berkaitan dengan konflik regional, ancaman teroris, persebaran senjata pemusnah massal serta kejahatan atas hak asasi manusia. Dalam lingkup bantuan luar negeri, kementerian ini lebih banyak berfungsi untuk menjalin adanya kerjasama humanitarian dalam pemberian adanya bantuan kemanusiaan kepada negara dan wilayah yang terdampak konflik. Dalam hal ini kementerian luar negeri Jerman bekerja sama dengan negara lain dan juga berbagai partner berskala internasional. Perangkat yang berhubungan dengan kementerian ini telah diatur di dalam Foreign Service Act yang telah disahkan sejak tahun 30 Agustus 1990. Dalam hal bantuan luar negeri, kementerian ini berfokus dalam ranah bantuan kemanusiaan atau humanitarian aid, baik yang diberikan secara langsung kepada satu pihak, melalui kerjasama bersama negara maupun organisasi internasional (German Federal Foreign Office, 1995 - 2023).

Kementerian ini menjalankan adanya kebijakan bantuan luar negeri didasari oleh adanya prinsip bantuan luar negeri yakni humanity, neutrality, impartiality, dan independence. Selain itu bantuan kemanusiaan juga didasarkan pada prinsip 'do no harm' untuk menghindari konsekuensi negatif tidak diinginkan dari adanya pemberian bantuan kemanusiaan.

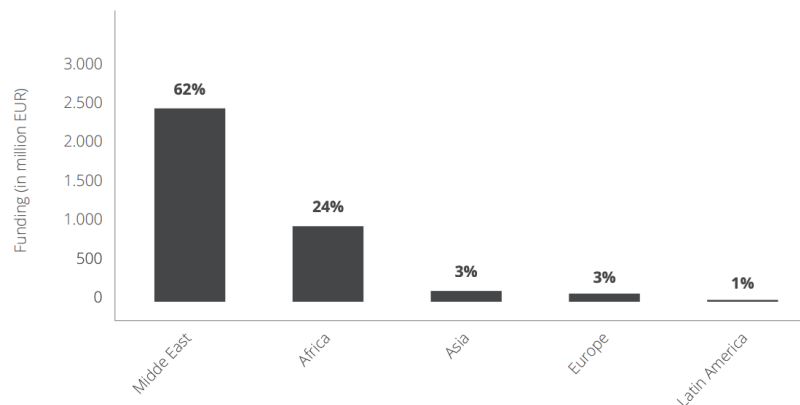
Bantuan Kemanusiaan menempati 9% dari seluruh jenis bantuan luar negeri yang diprogramkan oleh Pemerintah Jerman (OECD, 2020). Berdasarkan laporan yang dituliskan pada laman resmi Kementerian Luar Negeri, semenjak tahun 2012 Jerman terus meningkatkan keterlibatannya dalam pemberian bantuan kemanusiaan. Pada tahun 2012 Pemerintah Jerman mendedikasikan 105 juta euro hanya untuk bantuan kemanusiaan. Selain itu pada periode 2014 hingga 2017, Jerman menggelontorkan dana sebesar 3.97 miliar euro untuk bantuan kemanusiaan yang menjadikan negara ini sebagai donor terbesar kedua dalam hal bantuan kemanusiaan, setelah Amerika Serikat.



Grafik 2.4 German's Humanitarian Assistance Funding 2014-2017

Source: German Federal Foreign Office (AA) Report, 2014 - 2017

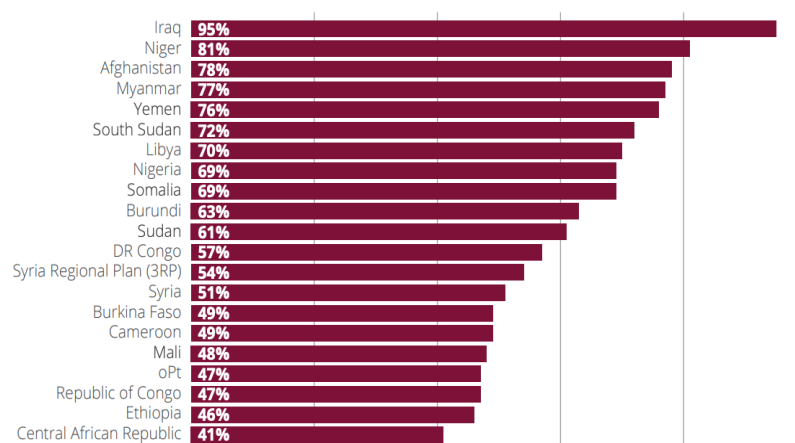
Jika dikomparasikan dengan periode 2010 hingga 2013, angka tersebut tiga kali lebih besar dari periode sebelumnya. Bantuannya secara umum difokuskan untuk daerah yang membutuhkan dukungan kemanusiaan terutama mereka yang terdampak serta terlibat konflik. Tidak berhenti di situ, Jerman juga menaikkan bantuannya dari 11.2% di tahun 2016 menjadi 37% di tahun 2020. Pada tahun 2021 Jerman tetap mempertahankan posisinya sebagai negara terbesar kedua atas pemberian bantuan kemanusiaannya sebesar lebih dari 2.5 miliar euro.



Grafik 2.5 German Humanitarian Assistance by Region 2014 - 2017

Source: Cha Berlin Report, 2019

Sebagian besar bantuan kemanusiaan Jerman ditujukan di area Timur Tengah, terutama Yaman dan Suriah dengan krisis yang dialaminya sehingga Jerman memberikan 4.4 miliar Euro sejak tahun 2012. Selain itu 600 juta Euro juga turut diberikan kepada Afganistan untuk nantinya dialokasikan pada program-program bantuan kemanusiaan. Burundi, Haiti, dan berbagai negara di Afrika Tengah juga turut menjadi prioritas bagi Kementerian Luar Negeri Jerman dalam memberikan bantuan kemanusiaan.



Grafik 2.6 Appeal Funding Requirements Met 2014 - 2017

Source: Cha Berlin Report, 2019

Bantuan Kemanusiaan Jerman yang berada di bawah tanggung jawab Kementerian Luar Negeri Jerman tidak hanya didistribusikan melalui bantuan

bilateral, tetapi juga melalui berbagai organisasi internasional untuk mencapai keefektifan. Lebih dari separuh dari keseluruhan bantuan kemanusiaan diberikan melalui organisasi naungan PBB, yakni mencapai 74%, sedangkan sisanya disalurkan melalui Palang Merah Internasional (12,0%), Non-Governmental Organization (13,0%), serta lembaga lainnya (1,0%).

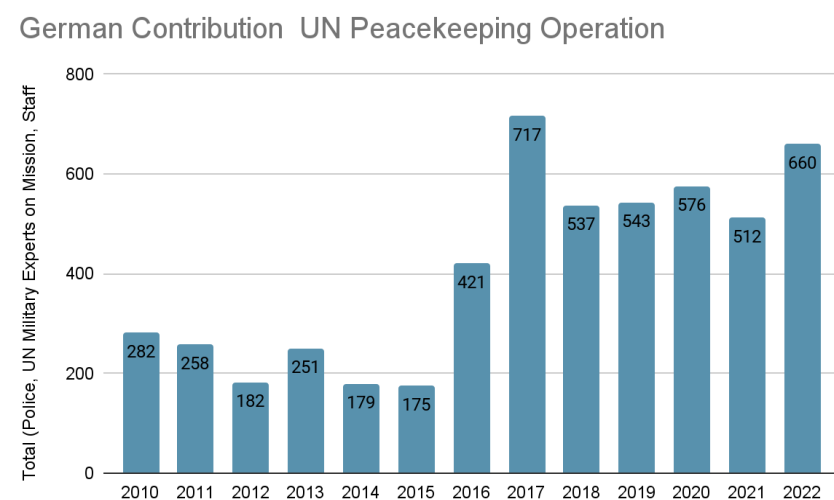
2.2.3 Federal Ministry of Defence (BMVG)

Kementerian Pertahanan Federal Jerman merupakan badan pemerintahan yang ada di bawah tanggung jawab Menteri Pertahanan Federal dengan peran sebagai kepala kementerian sekaligus panglima angkatan bersenjata Jerman. Selain itu, kementerian ini juga memiliki tugas dalam ranah administrasi pertahanan negara. Terdapat prinsip utama yang menaungi tugas-tugasnya, yakni *“Thinking and acting together”*. Dalam menjalankan tugasnya, kementerian ini membagi dua kursi resmi yakni bertempat di Bonn dan Berlin. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam *Law to Implement the Decision of the German Bundestag* pada 20 Juni 1991 mengenai penyempurnaan persatuan Jerman. Berbeda dengan kementerian luar negeri, kementerian ini berperan dalam hal pemberian bantuan militer atau *military aid* kepada negara maupun pihak yang membutuhkan. Pemberian bantuan militer tidak selalu dilakukan sendirian tetapi BMVG juga menjalin kerjasama dengan negara lain ataupun organisasi seperti Uni Eropa dan Persatuan Bangsa Bangsa (BMVG, 2023).

Kementerian ini salah satunya memberikan bantuan dalam bentuk bantuan militer atau pendampingan keamanan untuk mendukung adanya upaya terciptanya perdamaian yang didasari oleh adanya program PBB melalui berbagai operasi

peacekeeping (BMVG, 2023). Dalam berkontribusi di operasi ini, Jerman direpresentasikan melalui angkatan bersenjata (Armed Forces / Bundeswehr) dan Center for International Peace Operation (Zentrum für Internationale Friedenseinsätze). Terdapat 23 mandat yang ditetapkan dalam kebijakan peace operation, beberapa diantaranya yakni memerangi kejahatan terorganisir, anak-anak di dalam konflik bersenjata, perempuan, perdamaian, dan keamanan, dst (ZIF, 2023).

Langkah pertama Jerman dalam berkontribusi pada operasi perdamaian PBB adalah ketika Perang Teluk untuk membebaskan Kuwait di tahun 1991. Setelah itu, operasi pertama Bundeswehr di luar area NATO, adalah pada saat konflik Kamboja pada 1992 dan 1993, serta dilanjutkan dengan operasi di Somalia hingga tahun 1995. Kontribusi ini terus berlanjut hingga saat ini beberapa di antaranya dalam operasi UNIFIL (Lebanon), MINUSMA (Mali), UNMISS (South Sudan), UNSOM (Somalia), UNMIK (Kosovo), MINURSO (Western Sahara), dan masih banyak lainnya.



Grafik 2.7 German's Troop and Police Contribution 2010 - 2022

Source: United Nations Peacekeeping, 2010 - 2022

Berdasarkan kontribusinya selama ini, Jerman menjadi negara terbesar keempat yang menjadi kontributor dalam pendanaan peacekeeping missions, setelah Amerika Serikat (27,89%), Cina (15,21), dan Jepang (8,56%) serta menjadi negara terbesar kelima yang menjadi kontributor dalam pasukan PBB seluruh Eropa. Diketahui melalui laman resmi Kementerian Luar Negeri, Jerman menyumbang 6.09% dari seluruh budget misi perdamaian di dunia. Sedangkan dalam hal dukungan pengiriman personel pada operasi perdamaian PBB, Jerman berada pada urutan ke 35 dengan total personel yang dikirimkan sebanyak 660 pada tahun 2022, jauh di bawah Bangladesh (7233 personel), Nepal (6251 personel), dan India (6043 personel).

Tidak hanya melakukan bantuan militer melalui adanya operasi PBB, terkadang Jerman juga langsung memberikan bantuannya kepada pihak tertentu. Contohnya yang belakangan saja dilakukan adalah pada saat perang Ukraina dan Rusia, dimana Jerman memberikan bantuan sebesar 2 miliar euro pada tahun 2022, dan 2,2 miliar euro di tahun 2023 ini.

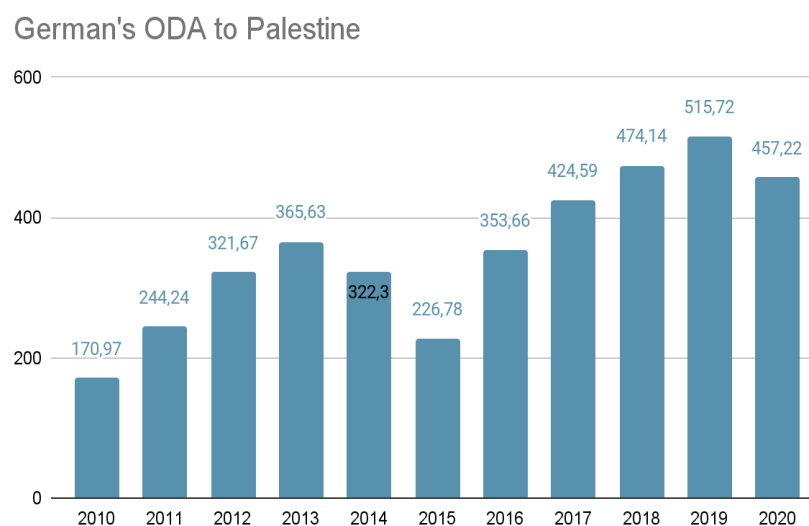
2.3 Pemberian Bantuan Luar Negeri Jerman terhadap Palestina

2.3.1 Bantuan Ekonomi (*Financial Aid*)

Hampir separuh dari seluruh bantuan luar negeri Jerman dialokasikan dalam bentuk bantuan ekonomi dan kerjasama pembangunan. Dalam kasus krisis Palestina, Jerman menyatakan ingin memberikan bantuan untuk mencapai adanya solusi perdamaian di kawasan Timur Tengah. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas bantuan ini, BMZ (Federal Ministry of Economic Cooperation and Development), mengawali bantuan dengan komitmennya untuk menciptakan

kondisi kehidupan yang layak dan mewujudkan peluang pembangunan yang komprehensif bagi masyarakat yang ada di wilayah Palestina. Secara khusus bantuan ini disalurkan melalui program *Official Development Assistan* (ODA) yang terbagi menjadi dua, yakni bilateral dan multilateral.

Jerman melalui laman resmi BMZ mengatakan bahwa program kerjasama pembangunan dan bantuan ekonomi yang diberikan kepada Palestina memiliki tujuan untuk mempersiapkan institusi bagi pembentukan Negara Palestina di masa depan secara efektif.



Grafik 2.8 German's ODA to Palestine 2010 – 2020

Source: Organisation for Economic Cooperation and Development Stat, 2010 - 2020

Jerman memulai bantuannya sejak awal tahun 1980 dengan melakukan kerjasama pembangunan. Pada periode tersebut Jerman melakukan beberapa program yang berkaitan dengan konstruksi pengolahan limbah air melalui sistem desalinasi, pembangunan dari sistem pelatihan vokasional, dan program penyuluhan tindakan non-kekerasan kepada masyarakat sipil. Terdapat 2 fokus utama yang menjadi prioritas bantuan pembangunan Jerman kepada Palestina, yakni:

- a. Pembangunan ekonomi berkelanjutan, pelatihan serta penyuluhan pekerja
- b. Pembangunan institusi publik dan dukungan terhadap masyarakat sipil (pemerintahan)

2.3.1.1 Official Development Assistant (ODA) Bilateral

Sejauh ini, Jerman telah membuktikan komitmennya dengan memberikan bantuan lebih dari 1.4 miliar euro melalui adanya kerjasama pembangunan bilateral dengan wilayah Palestina. Karena ini pula, Jerman menjadi salah satu donor terbesar bagi Palestina. Negosiasi terakhir di antara Palestina dan Pemerintah Jerman dilakukan di bulan September 2021 bersamaan dengan adanya covid-19. Pada kesempatan itu, Jerman berkomitmen untuk memberikan 100 juta euro untuk proyek kerjasama bilateral tahunan keduanya dalam periode 2 tahun kedepan.

Tabel 2.2 German's ODA by Sector – Bilateral Commitments by Donor and Recipients (Specially for West Bank and Gaza Strip Palestinian Territory)

Sector	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Bilateral ODA	75.33	99.78	122.28	146.55	129.93	91.25	152.08	172.58	211.37	222.89	193.15
Social Infrastructure & Services	34.89	73.56	100.98	81.04	81.24	49.71	56.55	84.54	56.43	133.18	117.42
Education	13.29	34.49	22.47	26.87	26.93	32.94	21.29	67.92	31.50	34.44	28.32
Water Supply & Sanitation	7.02	9.45	54.64	40.36	34.51	10.87	22.67	6.91	17.32	23.58	24.33
Economic Infrastructure & Services	5.59	3.67	4.08	6.37	1.00	1.57	3.32	12.82	21.76	12.73	15.14
Multisector	27.08	14.36	1.20	17.98	14.63	12.50	4.14	27.95	49.31	2.48	14.82

Source: Organisation for Economic Cooperation and Development Stat, 2010 – 2020)

Jerman tidak hanya bekerja sendirian, tetapi juga menjalankan berbagai proyek bersama dengan agen-agen berbasis keagamaan, pemerintah daerah,

organisasi non pemerintah, dan yayasan politik. Perlu digaris bawahi bahwasanya pendanaan yang dilakukan oleh Jerman melalui BMZ tidak diberikan langsung kepada Otoritas Palestina, melainkan melalui pendekatan berbasis proyek yang kemudian diimplementasikan bersama dengan mitra-mitra lainnya.

Bantuan Ekonomi dan Pembangunan Jerman yang berada di bawah BMZ (*Germany Development Ministry*), adalah sebagai berikut (BMZ, 2023):

- a. Dukungan pelatihan dalam rangka memberikan dasar bagi masyarakat untuk pekerjaan dan perekonomian yang layak dimasa mendatang,
- b. Dukungan terhadap lapangan kerja melalui adanya program *labour-intensive infrastructure development*,
- c. Pembangunan sistem edukasi vokasi yang merupakan program kolaborasi dengan berbagai perusahaan,
- d. Pengenalan elemen pendidikan untuk mencapai strata pendidikan yang lebih tinggi,
- e. Layanan penempatan pekerjaan,
- f. Pelatihan kapasitas masyarakat untuk memulai bisnis pribadi
- g. Upaya penguatan sektor privat yang menjanjikan seperti pelayanan TI, pariwisata, dan pemrosesan makanan,
- h. Pengembangan lingkungan bisnis melalui adanya sistem asuransi deposit dan pendanaan kredit bergaransi dengan tujuan untuk melindungi hutang bank dari dinamika bisnis,
- i. Pengembangan literasi finansial di antara masyarakat dan pendampingan bagi otoritas terkait.

Salah satu area prioritas dari bantuan Jerman terhadap Palestina merupakan pembangunan ekonomi berkelanjutan, pelatihan, dan promosi pekerja. Pemerintah Jerman melalui komitmennya untuk dapat menciptakan kesempatan kerja dan pendidikan. Dalam laporan BMZ, lebih dari separuh (90%) dari masyarakat

Palestina menggantungkan hidupnya dengan bekerja serta memperoleh kebutuhannya kepada Israel. Sehingga ini menjad dasar yang penting bagi bantuan Jerman untuk membantu masyarakat Palestina mandiri dari segi ekonomi dan menghidupkan peran masyarakat pada wilayahnya.

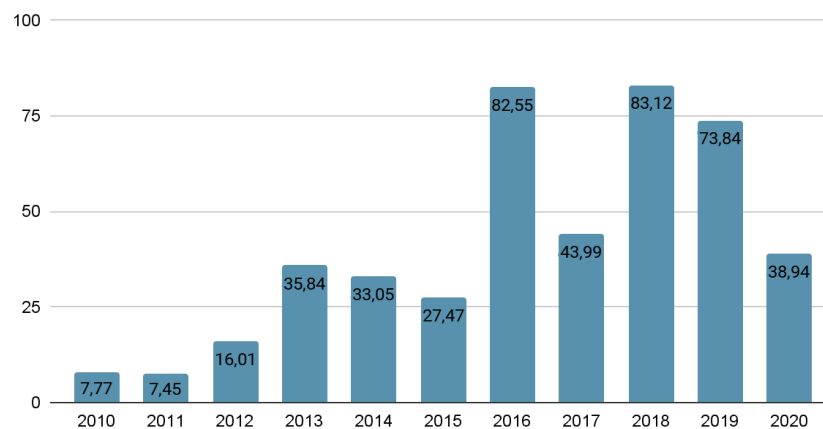
2.3.1.1.1. Hibah (Grant)

1) Humanitarian (Kemanusiaan)

Jerman melalui laman resmi Kementerian Luar Negeri secara langsung mendukung pelaksanaan negosiasi bersifat ‘*two-state solution*’ dalam menyelesaikan konflik di antara Palestina dengan Israel. Selain itu, untuk menyikapi dampak destruktif dari adanya konflik kedua pihak, Jerman banyak mengambil peran dalam pemberian bantuan kemanusiaan kepada Palestina yang diimplementasikan dengan adanya berbagai proyek bersama PBB, *International Committee of the Red Cross*, *World Food Programme*, dan berbagai organisasi non-pemerintahan. Bantuan kemanusiaan Jerman berfokus kepada keamanan pangan, persiapan aspek medis yang mendesak, keamanan, dan dukungan psikologi-sosial bagi masyarakatnya.

Jerman hadir di Palestina dengan menggandeng banyak agen kerjasama kebudayaan, seperti *Institute Français* dan *Goethe-Institute* untuk menjalankan Pusat Kebudayaan Prancis-Jerman di Ramallah, Palestina. Tidak berhenti disitu Pelayanan Pertukaran Akademik Jerman juga memberikan dukungan berupa program-program pertukaran pelajar dan peneliti di berbagai Universitas Palestina.

German's Humanitarian Aid to Palestine

**Grafik 2.9** German's Humanitarian Aid to Palestine 2010 – 2020

Source: Organisation for Economic Cooperation and Development Stat, 2010 - 2020

Pada tahun 2010 hingga 2013 timur tengah menjadi salah satu area yang menjadi prioritas bagi Pemerintah Federal Jerman. Sebesar 275.35 juta euro diberikan ke wilayah Timur Tengah khusus dalam ranah bantuan kemanusiaan. Wilayah Palestina menjadi penerima utamanya dengan total bantuan 35.54 juta euro selain dari Yaman (14.41 juta euro) dan Iraq (10.98 juta euro). Bantuan Jerman ini terdiri dari Kementerian Luar Negeri (AA) sebesar 31.46 juta euro. Kementerian Kerjasama Ekonomi Pembangunan (BMZ) sebesar 3.09 juta euro. Masing-masing kementerian memiliki fokus pendanaannya masing-masing sesuai dengan fungsi lembaganya.

Tabel 2.3 German Humanitarian Aid Focus to Palestine 2010 – 2013

Kementerian	Fokus	Jumlah
Kementerian Luar Negeri	Humanitarian Help	31,348,129.69
	Humanitarian Demining	114,907.31
	Total	31,463,037
	Bantuan Mendesak	2,085,276.29

Kementerian Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan	Bantuan Makanan Mendesak	1,000,000.00
	Total	3,085,276.29
Total Bantuan:		34,548,313.29

Source: (German Federal Foreign Office (AA) Report, 2010-2013)

Bantuan dan program yang disalurkan kepada Wilayah Palestina biasanya difokuskan kepada kebutuhan mendasar. Pada tahun 2010 pendanaannya berkaitan dengan shelter, air, makanan, serta rehabilitasi multi-sektor yang sifatnya mendesak. Pada tahun 2011, fokus bantuan diperluas dengan adanya tambahan seperti obat-obatan dan kebutuhan medis mendesak, makanan yang diperuntukkan kepada para siswa di jalur Gaza, serta rehabilitas para korban yang diamputasi. Pada tahun 2012, area bantuan tidak bertambah signifikan dengan adanya fokus kepada aspek pertolongan dan perlindungan pada hal-hal yang mendesak.

2) Educational (Pendidikan)

Jerman juga mencoba menciptakan kesempatan pendidikan dengan mengedepankan prinsip kesetaraan gender, dimana terdapat harapan akan terciptanya akses pendidikan yang setara antara anak-anak perempuan dan laki-laki di Palestina. Sejak tahun 2016 Jerman membangun proyek percobaan yang dinamai dengan “Palestinian-German Science Bridge” (PGSB). Proyek ini masuk kedalam upaya pembangunan Palestina yang mencakup hal-hal yang berkaitan dengan penelitian terintegrasi, program doktoral, serta studi kerjasama pembangunan antara Forschungszentrum Jülich dan jejaring mitra dengan universitas yang ada di Palestina. Melihat adanya kesuksesan dari proyek ini, proyek percobaan PGSB ini kemudian diperpanjang pada tahun 2020 untuk periode hingga pertengahan tahun

2024. Kesuksesan proyek ini juga berdampak pada pendanaan tambahan hingga 3.2 juta euro, sehingga dalam periode 2016 hingga 2024, PGSB akan menerima pendanaan sekitar 5.8 juta euro (German Federal Foreign Office, 2020).



Gambar 2.1 Project Example: Dual Study Programmes at Al-Quds University

Sourcer: German federal Ministry for Economic Cooperation and Development, 2020

Salah satu program unggulan berbasis edukasi yang dibentuk Jerman dalam kerjasamanya dengan Palestina adalah adanya ‘*Dual Study Programmes*’ di Universitas Al-Quds, Yerusalem Timur. Studi ganda yang dimaksud adalah susunan dari 2 aspek yakni *school-based* dan *industry-based* bagi beberapa program pendidikan, mulai dari teknik elektro, teknologi dan informasi, bisnis administrasi, teknik industri, dan manajemen. Melalui program ini pula, BMZ menyediakan berbagai pelatihan dengan menggandeng sekitar 220 perusahaan. Berdasarkan data terakhirnya, pada Februari tahun 2020, terdapat 29 lulusan dari program studi teknik elektro dan teknologi informatika menerima gelar diploma mereka (BMZ, 2020).

2.3.1.1.2. Technical Assistance (Pendampingan Teknis)

- 1) Development Assistantce (Pendampingan pembangunan)

Selain pendidikan, permasalahan air juga menjadi salah satu fokus program bantuan pembangunan dari Jerman kepada Palestina. Sebagai wilayah dengan ketersediaan air yang kurang memadai, hal ini dapat menjadi sumber konflik baru antar wilayah yang ada di kawasan Timur Tengah. Melalui adanya peluang konflik ini, Pemerintah Jerman sedari tahun 2016 memulai konstruksi Pusat Pengolahan Air Limbah di Kota Gaza sebagai area pertemuan bagi jutaan warga Palestina. Konstruksi ini mulai beroperasi sejak tahun 2020 dan masih terus dikembangkan hingga sekarang. Tidak hanya berdampak bagi Palestina saja, adanya pengolahan limbah ini juga menjadi salah satu kontribusi Jerman dalam membantu mengurangi polusi terhadap air tanah dan laut Mediterania (BMZ 2023).



Gambar 2.2 Project Example: Gaza Central Wastewater Treatment Plant

Source: German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ), 2023

Pusat Pengolahan Limbah dibentuk tidak hanya di kota Gaza, tetapi juga di Tepian Barat (West Bank) tepatnya di Kota Nablus. Sejak tahun 2005, Jerman telah memberikan pasokan air dan membuat jaringan air di Nablus yang dapat memenuhi kebutuhan air bagi 200.000 masyarakat di kota tersebut. Pada saat ini, pasokannya kian ditingkatkan agar dapat memenuhi kebutuhan air bagi 250.000 masyarakat Kota Nablus dan sekitarnya (BMZ 2023).

2.3.1.2 Official Development Assistant (ODA) Multilateral

1. Uni Eropa (*European Union*)

Jerman merupakan salah satu negara Eropa yang cukup aktif dalam menyuarkan bantuan kepada Palestina di dalam kawasan Uni Eropa. Salah satunya pada momen setelah pandemi covid-19 terjadi, Jerman memberikan dukungannya kepada Uni Eropa untuk meningkatkan bantuannya kepada Palestina. Dalam pertemuan tingkat tinggi ketiga Uni Eropa dan Palestina yang diselenggarakan pada tahun 2022 pasca pandemi, Uni Eropa berkomitmen dalam rencana pemberian bantuan sebesar 200 juta euro untuk mendorong perekonomian dan investasi hijau berkelanjutan Palestina. Hal ini dilakukan sebagai upaya pemulihan Palestina pasca goncangan covid-19. Dalam rencana dan perjanjian di pertemuan ketiga ini, Kementerian Luar Negeri Jerman melalui representatifnya, Oliver Owczar menyampaikan pidato sebagai berikut:

“I am delighted to witness the signing of the additional EU contribution to the “European Palestine Credit Guarantee Foundation”. This support – that is complementing previous financing from Germany – is a showcase for the very successful cooperation between Germany, EU and the Palestinian side. It will further have a substantial impact on the ground.” (Oliver Owczar dalam Uni Eropa, 2022)



Gambar 2.3 Team Europe Signs Some EUR 200 million in Agreements to Boost the Palestinian Economy, Support Sustainable Green Investment and Covid19 Economic Recovery

Source: European Union, 2022

Selaras dengan dukungan Jerman di dalam forum, Jerman juga beberapa kali melangsungkan kerjasama bersama Uni Eropa untuk membantu masyarakat Palestina atas konflik yang terjadi dengan Israel. Pada 18 September 2013, Jerman dan Uni Eropa berhasil mendapatkan penghargaan atas Proyek Konstruksi Pengolahan Limbah Air di Nablus Timur, Palestina. Proyek ini merupakan proyek gabungan keduanya dimana Uni Eropa mendanai sebesar 20 juta euro sedangkan Jerman mendanai sebesar 21.8 juta euro dan ditambahkan oleh pemerintah Nablus sebesar 3.4 juta euro. Proyek ini kemudian dijalankan oleh Bank Pembangunan KfW Jerman dengan menggandeng berbagai pihak yang ada di Palestina (UN, 2013).

Selama bertahun-tahun permasalahan air di Palestina menjadi perhatian bagi negara-negara pemberi donor. Meskipun Jerman telah memberikan bantuan dalam pasokan air di Nablus sejak tahun 2005, tetapi nyatanya permasalahan air tidak terselesaikan begitu saja, Limbah di Nablus Timur menjadi salah satu permasalahan lainnya, dimana limbahnya mengalir ke area pertanian dan juga berbagai

perkampungan di sekitarnya. Hal ini menimbulkan kekhawatiran tersendiri terutama pada dampak kesehatan dan pencemaran terhadap lingkungan yang akan berdampak signifikan bagi banyak aspek lainnya. Dengan adanya permasalahan ini Uni Eropa sejak tahun 2011 menambahkan sektor air dan sanitasi dalam sektor prioritas bantuan finansialnya bagi Palestina. Melihat adanya keselarasan konsen antara Uni Eropa dan Jerman dibentuklah proyek ambisius pada tahun 2013 berupa Konstruksi Pengolahan Limbah di Nablus Palestina. Proyek ini dibuat untuk mencapai target kebermanfaatan kepada 150.000 masyarakat Palestina dan mengurangi dampak kesehatan dari permasalahan limbah terdahulu. Air bersih hasil pengolahan ini kemudian dialirkan untuk Kota Nablus Timur serta 6 perkampungan di sekitarnya (Salem, Azmut, Kafer Qalil, Der Al-Hatab, Rujeeb, dan Beit Furik) (UN, 2013).

2. Persatuan Bangsa-Bangsa (*United Nation*)

Sebagai organisasi yang bertugas untuk mengupayakan perdamaian dunia, PBB mendapat banyak pendanaan dari berbagai pihak termasuk negara sebagai bentuk dukungan terhadap tujuan perdamaian dunia. Jerman merupakan salah satu negara yang banyak menyalurkan pendanaannya melalui PBB, terutama kepada negara-negara yang terdampak konflik seperti Palestina. Tidak hanya kepada PBB secara umum, Jerman juga memberikan pendanaannya kepada berbagai organisasi di bawah payung PBB dengan spesifikasi program yang sesuai dengan nilai-nilai bantuan yang dituju. Berikut adalah rincian pendanaan Jerman kepada Badan PBB (NGO Monitor, 2023):

Tabel 2.4 German's Funding Funding to UN Bodies for Projects in Israel, the West Bank, and Gaza

Badan PBB	2020	2021	2022
Pendanaan Humaniter Wilayah Pendudukan Palestina	13,821,818 USD	12,651,832 USD	16,791,061 USD
Office for the Coordinator of Humanitarian Affairs (OCHA)	1,103,752 USD	1,157,203 USD	19,932,258 USD
United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA)	60,584,183 USD	93,674,980 USD	98,458,654 USD
World Food Programme (WFP)	11,470,337 USD	22,873,944 USD	21,344,873 USD
World Health Organization (WHO)	1,000,000 USD	2,922,307 USD	1,603,216 USD

Source: NGO Monitor, 2023

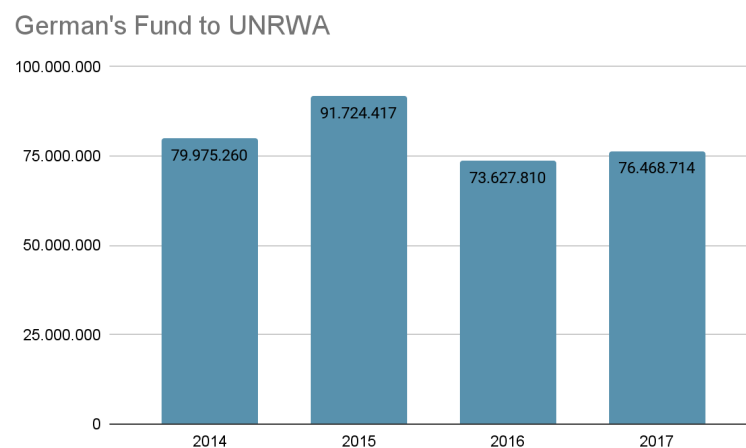
a. UNRWA

Munculnya gelombang pengungsi merupakan salah satu implikasi dari adanya konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina, berdasarkan rilis data dari PBB, terdapat 5 juta pengungsi Palestina yang tersebar di Timur Tengah pada tahun 2013 dan terus mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan hingga saat ini. Permasalahan pengungsi Palestina inilah yang mendorong adanya kemunculan dari UNRWA (*United Nation Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Middle East*). Organisasi turunan dari PBB ini telah bekerja pada area ini selama lebih dari 70 tahun.

Agen pengungsi Palestina UNRWA merupakan satu dari 3 organisasi bantuan PBB yang paling utama, selain dari World Food Program (WFP) dan UNHCR. Mandat UNRWA selalu mendapat pembaruan setiap 3 tahun sekali, yang bantuannya mencakup lebih dari 5.3 juta pengungsi Palestina di Jordan, Lebanon, Suriah, Tepi Barat dan Jalur Gaza. terdapat 1.5 juta orang yang hidup di kamp

pengungsian pada tahun 2012 dan terus bertambah hingga saat ini. UNRWA menjadi pihak yang membantu pengungsi Palestina dalam ranah pendidikan, kesehatan, nutrisi, dan infrastruktur. Bantuan yang ada kemudian disalurkan langsung kepada otoritas lokal.

Pemerintah Federal Jerman melalui BMZ (Kementerian Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan) merupakan satu dari penyumbang finansial dan politis yang terbesar bagi kinerja UNRWA. Sebagai member dari UNRWA Advisory Commission (AdCom), Pemerintah Federal Jerman meneruskan komitmennya untuk inisiasi pada tahun 2007 yang bertujuan untuk memperkuat program bantuannya. Pada periode 2010-2015 Jerman mencoba meningkatkan kualitas bantuannya, perlindungan pada kelompok yang membutuhkan, promosi terhadap aspek gender dan partisipasi dalam program bantuan terhadap para pengungsi. Kontribusi tahunan sukarela Jerman terhadap UNRWA naik dari 8 ke 10 juta euro dengan volume pendanaan proyek naik dari 16.4 juta euro di tahun 2014 ke 32 juta euro di 2017.



Grafik 2.10 Federal Government Report on German Humanitarian Aid Abroad 2014 - 2017

Source: UNRWA dalam Deutsche Humanitare Hilfe, German Federal Foreign Office (AA), 2014 - 2017

b. UNDP

Jerman telah menjadi mitra UNDP untuk bantuannya terhadap Palestina selama (*tahunnya diisi*). Salah satu program kerjasama Jerman dengan UNDP kepada Palestina adalah dengan adanya “*Investment Programme for Resilience*”. Program IPR ini adalah program dari pemerintah Jerman, khususnya KfW sebagai lembaga yang bertanggung jawab bersama dengan UNDP. Program IPR ini dibentuk dari adanya kerjasama Jerman dengan UNDP sejak tahun 2002 melalui adanya “*Employment Generation Programme*” di Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Jalur Gaza. Dari program tersebut tercatat Jerman telah mendanai lebih dari 100 juta euro hingga saat ini (UNDP, 2021).

Bantuan IPR (*Investment Programme for Resilience*) oleh Jerman dan UNDP ini juga menjadi salah satu program yang membantu Palestina dalam menghadapi pandemi covid-19 sepanjang tahun 2020 hingga 2021 terutama pada langkah mitigasi dampak jangka menengah hingga panjangnya. Pada tahun 2021, Jerman dan UNDP melalui IPR memberikan bantuannya sebesar 10 juta euro dan pendanaan dari Jerman sebesar 29 juta euro (UNDP, 2021).

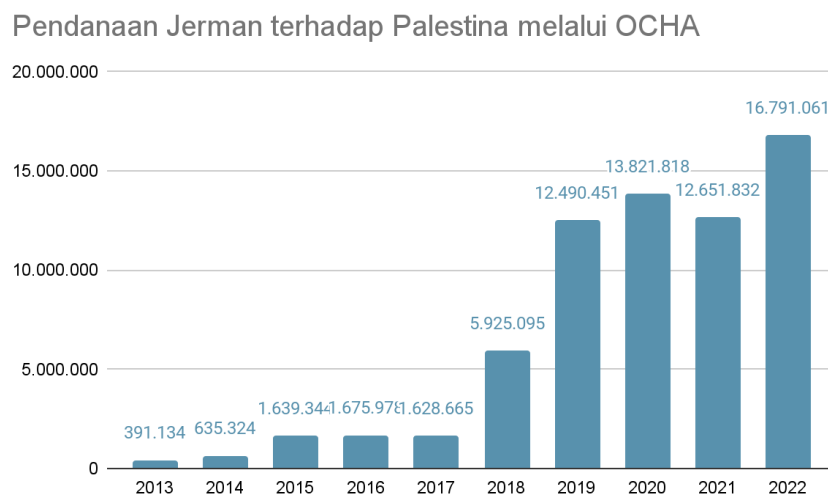
Sebagai tanggapan dari bantuan Jerman, Dr Mohammad Shtayyeh (Perdana Menteri Palestina) memberikan pernyataannya sebagai berikut:

“Thanks to Germany, the taxpayers, the government, the KfW, and indeed to UNDP for their spirit of cooperation on a number of projects that are vital to our people. These projects are a lever for the economy for us to strengthen our people's steadfastness and provide them with better service on the one hand, and to achieve

the political goal that we aspire to, which is to end the occupation and build our independent Palestinian state on the other.”, (Dr Mohammad Shtayyeh dalam UNDP, 2021).

c. UN-OCHA (UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs)

Jerman merupakan negara kedua yang menjadi donor bagi OCHA dengan menyumbangkan 19,647,102 USD pada tahun 2023. Jerman berada tepat di bawah Inggris yang menyumbangkan 25,423,729 USD sebagai negara donor pertama bagi OCHA. Salah satu negara yang menjadi target bagi pemberian bantuan Jerman melalui OCHA adalah Wilayah Palestina (UNOCHA, 2023).



Grafik 2.11 German's Funding to Palestine through OCHA

Source: UNOCHA, 2013 - 2022

Berdasarkan data dari OCHA, Jerman memulai pendanaannya untuk Palestina melalui OCHA sejak tahun 2013. Pada tahun itu, Jerman menyumbangkan 391,134 USD untuk Palestina. Seiring berjalannya waktu bantuan bantuan yang diberikan Jerman terus meningkat signifikan, meskipun sempat terjadi penurunan pada tahun 2017 dan 2021. Pada tahun 2022 pendanaan

Jerman kembali naik hingga mencapai angka 16,791,061 USD (OCHA, 2013-2022). Bantuan yang diberikan Jerman kepada Palestina melalui OCHA sebagian diberikan kepada organisasi non pemerintahan Palestina seperti Union of Agricultural Work Committees (UAWC), Medical Aid for Palestinians (MAP), Palestinian Center for Human Rights (PHCR), Union of Health Work Committees (UHCW), dan Health Work Committees (HWC) (NGO Monitor, 2023).

Pemerintah Jerman memberikan bantuannya kepada berbagai pihak NGO di Timur Tengah, termasuk Palestina (Tepian Barat & Jalur Gaza) serta Israel. Hal ini yang menurut Pemerintah federal Jerman sebagai upaya dalam mendukung adanya perdamaian di kawasan Timur Tengah. Jerman memberikan bantuan luar negeri terhadap Palestina tidak hanya melalui Organisasi Internasional dan agenda bantuan internasional saja, tetap Pemerintah Jerman juga memberikan bantuannya melalui Organisasi Non Pemerintahan Palestina yang beroperasi di Tepian Barat dan Gaza. Bantuan yang disalurkan melalui NGO ini mayoritas berada di bawah naungan Kementerian Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi Jerman (BMZ), Kementerian Luar Negeri (AA), dan Persatuan Bangsa Bangsa (NGO Monitor, 2023).

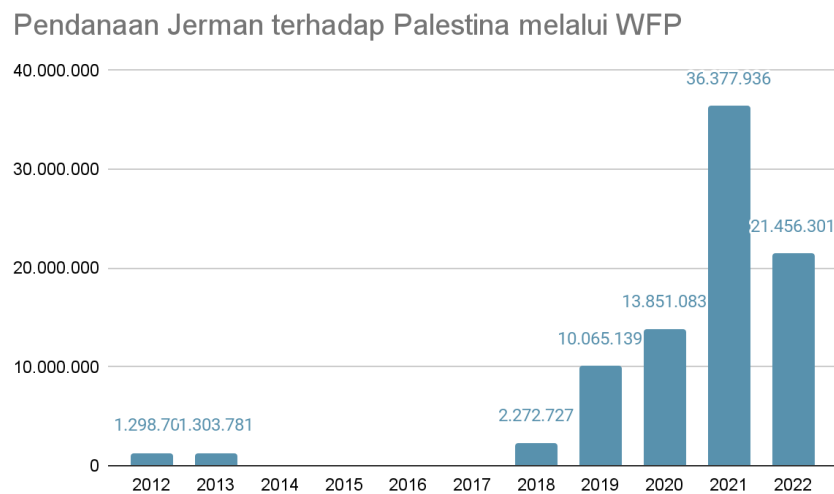
Pada tahun 2019 hingga 2020, Jerman diketahui telah menyediakan sekitar 25 juta USD kepada UN-OCHA (UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs) khusus pada pendanaan terhadap wilayah yang diduduki Palestina. Pendanaannya disalurkan melalui organisasi di bawah PBB kepada NGO Palestina yang dinilai bermasalah, seperti Palestinian Center for Human rights (PCHR), UAWC, Health Work Committees (HWC), Union of Health Work Committees

(UHCW), dan Pusat Pembangunan Ma'an. Selain itu, pada periode 2019-2020 Jerman juga menyalurkan dana sekitar 16 juta USD untuk proyek di Gaza bersama *World Food Program* (WFP) dengan menggandeng beberapa NGO Palestina termasuk UAWC.

Berdasarkan kurangnya transparansi data pendanaan dari Jerman terhadap NGO di Palestina, sajian data kemudian coba di verifikasi dan di evaluasi oleh organisasi bernama NGO Monitor. Berdasarkan data resmi yang disajikan oleh NGO monitor, terdapat 8 NGO Palestina di bawah naungan NGO bernama *Popular Front of the Liberation of Palestine* (PLFP) yang mendapat alokasi dana dari Pemerintah Jerman melalui UNOCHA. Organisasi ini dilaporkan memiliki hubungan dengan kelompok teror menurut definisi dari Uni Eropa.

d. World Food Programme (WFP)

Jerman turut berkolaborasi dan mendukung program pangan dunia terutama kepada daerah konflik seperti Palestina. Berdasarkan report dari UN-OCHA yang membawahi program ini, Jerman memberikan bantuannya kepada Palestina melalui WFP sejak tahun 2012 dengan besaran 1,298,701 USD dan berlangsung hingga saat ini (OCHA, 2012).



Grafik 2.12 German's Funding to Palestine through WFO 2012 – 2022

Source: WFP dalam UNOCHA, 2012-2022

Meskipun sempat terputus pada tahun 2014 hingga tahun 2017, tetapi Jerman mulai kembali memberikan pendanaannya di tahun 2018 dan terus meningkat di tahun-tahun setelahnya. Pada tahun 2020 dan 2021 pendanaannya meningkat drastis karena adanya krisis pangan akibat pandemi covid-19. Pendanaan yang terbaru pada tahun 2022 Jerman telah memberikan pendanaannya kepada Palestina terkhusus Jalur Gaza dan Tepian Barat sebanyak 21,456,301 USD melalui program WFP (OCHA, 2012-2022).

2.3.2 Bantuan Politik (Political Aid)

Bantuan Jerman terhadap Palestina tidak hanya diberikan dalam bentuk proyek pembangunan saja melainkan juga dalam aspek struktural. Pada 18 Mei 2010 bertempat di Ramallah Palestina, Jerman melalui kementerian Luar Negeri membentuk Komite Pengawasan Jerman-Palestina (*German-Palestinian Steering Committee*) dengan *tagline* “*Future for Palestine*”. Komite ini dibentuk oleh Kementerian Luar Negeri Jerman (direpresentasikan oleh Guido Westerwelle

sebagai Menteri Luar negeri) kepada otoritas Palestina (direpresentasikan oleh Perdana Menteri Salam Fayyad) dengan tujuan untuk memperoleh solusi yang baik bagi kedua negara yang berkonflik (*two-state solution*). Pembentukan komite ini bukan hanya didasari oleh upaya penguatan ikatan Jerman dengan Palestina, melainkan didahului adanya tanggung jawab moral bagi keamanan dan pembentukan Negara Israel. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Guido Westerwelle dalam pidatonya hari itu.

“By reason of our history my country bears a special moral responsibility for the security and existence of the State of Israel. Our close partnership with Israel is an immutable cornerstone of German foreign policy....” (Guido Westerwelle dalam German Federal Foreign Office, 2010).

Selain fokus pembahasan pada kemungkinan implementasi terbaik dari kebijakan pembangunan yang ditawarkan, pertemuan pertama pada tahun 2010 ini juga dilakukan upaya diskusi terkait dengan struktur suatu negara yang baik. Dari adanya pertemuan pertama ini tercapai perjanjian yang mencakup beberapa area kunci, seperti permasalahan air, pembangunan ekonomi, dan penguatan pasukan kepolisian. Bersamaan itu pula, Jerman menjalankan beberapa proyek pembangunan sebesar 42.5 juta euro dan menyumbang 140 juta euro baik dalam bantuan bilateral maupun multilateral kepada Wilayah Palestina (German Federal Foreign Office, 2010).

Setelah pembentukan di tahun 2010, Komite Pengawasan Jerman-Palestina melakukan pertemuan rutin setiap 2 tahun sekali. Jika pertemuan pertama

diselenggarakan di Ramallah, pertemuan kedua pada tahun 2012 dilakukan di Berlin, Jerman. Pada pertemuan kedua ini, Pemerintah Jerman masih tetap menekankan bahwasanya kunci dari penyelesaian dari konflik Palestina dengan Israel ada pada metode '*two-state solution*'. Selain itu, terdapat perluasan area bantuan yakni ditambahkannya sektor pendidikan, strategi berkelanjutan, dan pembangunan pasukan keamanan (German Federal Foreign Office, 2012). Pertemuan ketiga (2014) dan keempat (2016) masih melanjutkan fokus pada upaya internasional untuk menyelesaikan konflik di Timur Tengah. Hal yang berbeda di pertemuan ketiga dan keempat adalah upaya untuk berdiskusi pada sektor pembangunan, pendidikan, perekonomian, serta struktur pemerintahan lebih dalam. Hal ini terlihat dari upaya menghadirkan berbagai menteri dari kementerian-kementerian yang berkaitan dengan sektor tersebut (German Federal Foreign Office, 2014).

Komite Pengawasan Jerman-Palestina melanjutkan pertemuannya yang kelima pada tahun 2020, setelah adanya pemberian bantuan yang setara dengan 320 juta euro untuk masyarakat Palestina di tahun 2019 melalui UNRWA dan pendampingan humaniter dalam sektor pemerintahan lokal, pendidikan, serta keilmuan. Pertemuan ini dilakukan di tengah pandemi Covid-19 sehingga pertemuannya tidak diselenggarakan baik di Berlin maupun di Ramallah melainkan dengan media virtual. Bertepatan dengan pandemi Covid-19 yang menimpa seluruh wilayah di dunia termasuk Palestina menjadikan salah satu fokus dari pertemuan kelima ini adalah upaya untuk menghadapi efek dari pandemi yang ada. Dalam hal ini, Jerman memberikan sokongan dana ke UNRWA untuk menghadapi krisis di

wilayah Palestina terdampak covid-19 sebesar 20 juta euro melalui organisasi yang berkewenangan. Selain dari fokus tersebut, pertemuan kelima ini masih terus membahas terkait dengan reformasi serta pembangunan terbaru dalam proses perdamaian di Timur Tengah. Melalui Menteri Luar Negeri Jerman Maas yang hadir pada pertemuan kelima ini, Jerman kembali menegaskan jalan keluar satu-satunya dalam konflik ini adalah dengan menjalankan penyelesaian dua negara (German Federal Foreign Office, 2020). Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Maas:

“From our point of view, borders may only be altered as the result of negotiations or with the agreement of both sides. We therefore call for the resumption of direct negotiations between Israelis and Palestinians and are ready to support this course with our partners. Unilateral steps are no alternative.” (Heiko Maas dalam German Federal Foreign Minister, 2020).

2.3.3 Bantuan Militer (*Military Aid*)

Secara keseluruhan aspek keamanan sampai saat ini belum menjadi inti dari bantuan luar negeri yang diberikan oleh Jerman kepada Wilayah Palestina. Jerman lebih banyak memberikan pendampingan dan dukungan bagi terciptanya keamanan di Wilayah Palestina melalui adanya hukum terkait keamanan masyarakat sipil dan pembentukan polisi sipil di wilayah ini. Dukungan ini diberikan sejak tahun 2008, dimana Menteri Luar negeri Jerman pada saat itu, Steinmeier, berpidato dalam Konferensi Berlin terkait dengan pembahasan solusi dua negara pada konflik Palestina dengan Israel. Selain menekankan kepada urgensi adanya negosiasi kedua negara, Jerman juga menggaris bawahi bahwa konferensi ini juga bertujuan untuk mendiskusikan serta mengupayakan adanya struktur keamanan bagi masyarakat

Palestina. Melalui pidato dari Steinmeier, Jerman menyatakan bahwa adanya kesempatan di dalam konferensi ini untuk mewujudkan komitmen mereka untuk membantu Palestina dalam membentuk polisi sipil mereka seiring dengan pembentukan struktur hukum yang mengatur keamanan di wilayah ini (German Federal Foreign Office, 2008).

“We are gathered here today to support your government in very concrete terms as it builds up its Civil Police and establishes rule-of-law institutions, with projects that have an immediate impact and make a real difference.” (Steinmeier dalam German Federal Foreign Office, 2008)

Bantuan terhadap pembentukan aturan hukum dan polisi sipil yang diberikan oleh Jerman ini selaras dari adanya Komitmen yang terbentuk antara Amerika Serikat dengan Uni Eropa. Keduanya berkomitmen untuk mewujudkan adanya keamanan bagi wilayah Palestina, dimana AS berfokus pada keamanan nasional sedangkan di sisi lain Eropa berfokus pada polisi sipil serta badan pengadilan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Steinmeier dalam pidatonya di Konferensi Berlin saat itu:

“..we agreed early on to split the tasks between the US and Europe. America is accordingly in charge of support for the National Security Forces, while Europe has taken on the Civil Police and the justice sector.” (Steinmeier dalam German Federal Foreign Office, 2008)

Sebagai salah satu bagian dari Uni Eropa dan dengan posisinya yang cukup vokal dalam menyuarakan Wilayah Palestina, Jerman mendukung adanya

komitmen ini dengan memulai adanya berbagai pertemuan yang bertujuan untuk mendiskusikan strategi dan proyek pembentukan polisi sipil dan aturan hukum di Palestina, salah satunya dengan adanya Konferensi Berlin tahun 2008. Tidak hanya melakukan upaya strategis, Jerman juga berkomitmen untuk memberikan 15 juta euro dalam program pelatihan serta pembentukan infrastruktur kepolisian Palestina pada periode tahun 2008 dan 2009 (German Federal Foreign Office, 2008).

Upaya mewujudkan institusi kepolisian Palestina yang baik juga berlanjut pada tahun 2010. Pada tahun 2009, Jerman membuktikan komitmennya dengan menyediakan 50 kendaraan dan lebih dari 800 radio pemantauan kepada kepolisian Palestina. Selain itu, pada tahun 2010 Jerman kembali menyumbangkan 290 radio pemantauan untuk mobil patroli kepolisian di Palestina. Pemberian bantuan jenis ini dinilai penting bagi Pemerintah Jerman sebagai bentuk pengembangan dan pencapaian efektifitas dalam upaya mewujudkan Institusi yang baik bagi Palestina (German Federal Foreign Office, 2010).